

Tantangan *International Labour Organization* (ILO) Dalam Upaya Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Bangladesh

Oleh :

Isabella Maria Agave Hutabarat
(belahth@gmail.com)

Pembimbing :

Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru**

**Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293**

Telp/Fax: 0761-63272

Abstract

This Research is a contemporer study which analyzes about the challenge of International Labour Organization (ILO) in action to resolve the child labour problem in Bangladesh. Child labor is a social problem that has become a global issue and the agenda of nations in the world. The term child labor is often defined as work that hampers their childhood, their potential and their dignity, and is harmful to their physical and mental development. Bangladesh is a country with a high rate of child labor with a variety of issues contained therein. ILO as an international organization that deals with welfare has made various efforts but still has some challenges in resolving the problem of child labor in Bangladesh.

This study aims to identify and explain the challenges of the ILO in its efforts to eliminate the number of child laborers in Bangladesh. This research was developed based on the framework of pluralism perspective that is supported by the theory of international organization, as well as the level of analysis using the government as the main actor in international relations. The concept leads to qualitative methods and the study of literature as a source of information.

The challenges of ILO in its efforts to resolve the problem of child labor in Bangladesh, are the problem of poverty, the culture that assumed the child labour is normal, low education, and law enforcement that is not effective.

Keywords: *child labour, challenge, International Labour Organization (ILO), Bangladesh.*

Pendahuluan

Bangladesh adalah negara berkembang dengan penduduk yang padat dan tingkat pekerja anak yang tinggi, yaitu lebih dari 5% populasi pekerja anak di dunia. Anak-anak ditemukan bekerja hampir diseluruh sektor ekonomi seperti agrikultur, industri, jasa, dan sektor ekonomi informal. Kebanyakan dari mereka bekerja selama 48 jam per minggu dan mendapatkan kurang dari 500 taka (USD 6,44) per bulan. Sejumlah besar anak-anak bekerja di sektor agrikultur

(pertanian, kehutanan, dan perikanan) yakni 60,0% dari jumlah pekerja anak di dunia, 7,0% di sektor industri (pertambangan dan penggalian, manufaktur, konstruksi, dan utilitas umum seperti listrik, gas, dan air), 25,6% di sektor jasa (perdagangan dalam jumlah besar ataupun eceran, restoran, transportasi), dan 7,5% pada sektor yang belum terdefiniskan.

Di Bangladesh pekerja anak merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan. Hal ini menjadi suatu faktor dalam mempekerjakan anak-anak bahkan

dengan pekerjaan yang eksploitatif, upah yang murah, dan pekerjaan yang berbahaya. Keadaan pekerja anak adalah hal yang dilematis, di satu sisi anak-anak bekerja untuk memberikan kontribusi pendapatan keluarga namun mereka rentan dengan eksploitasi dan perlakuan yang salah. Faktor lain yang menyebabkan adanya pekerja anak yaitu adanya alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Dengan demikian para pengusaha memilih anak sebagai pekerjanya karena upah yang diberikan akan cenderung lebih murah daripada orang dewasa. Disamping itu anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.

ILO (International Labor Organization) atau Organisasi Buruh Internasional merupakan sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam hal menangani, mengawasi serta meningkatkan standar buruh internasional. Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap bencana gempabumi dan Dalam mengatasi masalah pekerja khususnya pekerja anak, ILO membentuk hubungan kemitraan dengan IPEC (*International Programme on The Elimination of Child Labour*). Organisasi ini didirikan pada tahun 1992 dan hingga saat ini telah beranggotakan 90 negara. Sementara untuk ILO sendiri hingga tahun 2013 terdapat 185 Negara yang telah resmi menjadi anggota. Negara Bangladesh menjadi anggota ILO secara resmi pada tanggal 22 Juni 1972. Ini berarti ILO telah berada di Bangladesh selama 41 tahun. Bangladesh telah meratifikasi 33 konvensi termasuk tujuh konvensi dasar ILO. Kantor ILO di Dhaka dibuka pada tanggal 25 Juni 1973.

Pekerja anak sangat erat kaitannya dengan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah-masalah yang dialami pekerja anak adalah bentuk-bentuk dari

pelanggaran HAM yang secara eksplisit dibahas dalam *Article 32 United Nations Convention On The Rights Of The Child*. *Pekerja anak adalah bentuk pelanggaran terhadap hak menikmati masa kanak-kanak dan hak berkembang secara fisik dan psikologi. Atas nama penegakan Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak, maka ILO sebagai lembaga internasional yang terfokus pada persoalan buruh tentunya memiliki peranan terhadap penanganan pekerja anak dan juga menyoroti negara Bangladesh sebagai negara dengan tingkat pekerja anak yang tinggi.*

Perspektif, Tingkat Analisa, Teori

Perspektif

Adapun perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perspektif pluralisme yang memiliki asumsi dasar sebagai berikut: (M. Saeri, 2012: 15-16)

- a. Menurut pandangan pluralisme aktor non negara merupakan kenyataan yang penting dalam hubungan internasional, seperti organisasi internasional dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.
- b. Dalam pandangan pluralisme negara bukanlah aktor tunggal karena negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan, dan individu-individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan negara bangsa bukanlah entitas yang terintegrasi, karena negara dan aktor non negara sering terlibat bersama dalam memformulasi aktifitas dan hubungan internasional, dan sering menimbulkan dan menerima akibat dari aktifitas internasionalnya.
- c. Menurut pandangan kaum pluralisme, negara bukanlah aktor rasional, dimana kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar-menawar, dan kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda.

d. Pluralisme memiliki agenda politik internasional sangat luas, dimana penganut pluralis menolak dominasi isu militer dan keamanan dalam hubungan internasional. Adapun salah satu isu terkini yang menjadi ranah pluralisme yaitu mengenai *early warning system* (Yulius P. Hermawan (editor), 2007: 9)

Dari penjabaran di atas perspektif pluralisme merupakan perspektif yang tepat untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan pluralisme terhadap organisasi internasional dapat dilihat dari salah satu asumsi dasarnya yaitu, *Non State Actor*, asumsi ini menyatakan bahwa identitas sangat penting dalam politik internasional, karena ini merupakan peran penting dalam memonitor dan menyarankan penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul.

Tingkat Analisa

Adapun tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Organisasi Internasional dimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu ILO (*International Labour Organization*).

Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori organisasi internasional. Clive Archer mendefinisikan Organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan persetujuan antara sedikitnya dua negara yang berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan-kepentingan bersama negara-negara anggota. Menurut Clive, salah satu peran organisasi internasional yaitu sebagai pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang otonom dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-

anggotanya. Organisasi Internasional dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Inter-Governmental Organizations* (IGO) atau organisasi antar pemerintah. Organisasi ini beranggotakan delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan-Badan Internasional dibawah PBB seperti ILO, UNICEF, UNESCO.
2. *Non-Governmental Organizations* (NGO) atau Organisasi nonPemerintah. Organisasi ini beranggotakan kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau bantuan ekonomi. Contohnya adalah Palang Merah Internasional dan Green Peace.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Pekerja Anak di Bangladesh dan Upaya ILO Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Bangladesh

Kondisi Pekerja Anak di Bangladesh

Buruh anak adalah permasalahan yang multidimensional dan kompleks. Masalah ini berkenaan dengan masalah kerentanan ekonomi, kerangka kerja legislatif dan hukum perburuhan yang tidak memadai, ketidakadilan kultural dan sosial, sistem pendidikan yang berkualitas rendah, termasuk penyediaan pendidikan teknis dan kejuruan yang tidak memadai. Beberapa laporan memberikan gambaran tentang fenomena buruh anak di Bangladesh, baik persebarannya, penyebabnya, faktor-faktor penentunya dan konsekuensinya terhadap pendidikan. Perhatian khusus diberikan kepada hubungan antara buruh anak dan sekolah.

Jumlah buruh anak di Bangladesh tinggi dikarenakan Bangladesh adalah negara dengan *income* yang rendah. GDP per kapita bangladesh adalah 957,82 USD (12,5 juta Rupiah), dan 36% dari populasi

hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari \$1 perhari. Penelitian menunjukkan negara dengan pendapatan per kapita rendah mempunyai jumlah buruh anak yang sangat tinggi yaitu 30-60%. Anak-anak ini berhenti bersekolah atau terpaksa bekerja dan bersekolah.

Sejumlah besar buruh anak di Bangladesh bekerja di sektor informal. Bahkan sangat banyak ditemukan bekerja di sektor berbahaya dan dalam kondisi yang eksploitatif. Situasi ini merupakan pelanggaran dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*Covention on The Rights of The Child*), Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum, dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Terburuk Pekerja Anak.

Pada tahun 2013 total populasi anak-anak di Bangladesh berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah sebesar 3,4 juta anak. Sebanyak 1,7 juta anak dari total populasi 5-17 tahun adalah pekerja anak. Pekerja anak yang bekerja disektor berbahaya adalah sebesar 1,28 juta dari total populasi anak 5-17 tahun.

Berdasarkan konferensi ILO ke 18 dan *Bangladesh Labour Act 2006*, keterlibatan anak dalam melakukan pekerjaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak. Anak yang bekerja (*working children*) adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan ketrampilan, atau belajar bertanggungjawab, misalnya membantu melakukan tugas-tugas dirumah, membantu pekerjaan orangtua di ladang, dan lain-lain. Pekerja anak (*child labour*) adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak tersebut.

Pada tahun 2013 sekitar 56,7% anak-anak yang aktif dalam kegiatan ekonomi tidak diberi upah, 76,7% dari jumlah tersebut adalah perempuan dan 7,1% anak-anak ditemukan bekerja secara

rutin. Totalnya sebanyak 1,28 juta anak-anak diperkirakan bekerja lebih dari 43 jam perminggu, Pendapatan bulanan rata-rata buruh anak usia 5-17 tahun adalah 5859 taka (USD 74,8). Penghasilan perbulan pekerja anak berbanding lurus dengan usia anak, dan penghasilan anak laki-laki lebih besar daripada penghasilan anak perempuan.

Anak-anak di Bangladesh bekerja diberbagai sektor, buruh anak paling banyak ditemukan pada sektor industri dan kedua terbanyak di sektor agrikultur. Di sektor industri bekerja pekerja anak sebanyak 37,5 persen dari 1,7 juta anak dan di sektor agrikultur sebanyak 21,8 persen dari 1,7 juta anak. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 94,85 persen anak-anak bekerja di sektor informal.

Hampir 95% dari pekerja anak di Bangladesh, bekerja di sektor informal tanpa surat perjanjian kerja resmi maupun jaminan kerja. Bekerja di sektor informal berarti segala keputusan berada di tangan sang majikan. Di sektor informal. Majikan di sektor informal tidak tunduk terhadap aturan tertentu, mereka juga tidak mempunyai kewajiban untuk melindungi hak si pekerja anak, sehingga tidak jarang ditemukan eksploitasi pekerja anak.

Bangladesh Bureau of Statistics menunjukkan estimasi jumlah anak yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga pada tahun 2013 adalah 421.426 anak.

Sekitar 78% dari anak-anak ini adalah perempuan, usia minimum adalah enam tahun dan lebih dari 21% berusia di bawah 11 tahun . Rata-rata, mereka bekerja sembilan jam sehari dan 99% bekerja untuk tujuh hari seminggu. Buruh anak dilaporkan sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Lebih dari 100.000 dari anak-anak tersebut bekerja selama 43 jam atau lebih secara berturut-turut, dilecehkan oleh majikan mereka, bekerja dalam kondisi suhu ekstrem, bekerja dengan resiko terluka, cacat, atau terbakar, dan bekerja dibawah sinar matahari langsung selama berjam-jam.

Beberapa survey dilakukan untuk melihat keterlibatan anak-anak sebagai buruh di sektor-sektor informal di Bangladesh. Survei dasar buruh anak di sektor pengisian/daur ulang baterai pada tahun 2013 yang dilakukan oleh *Bangladesh*

Bureau of Statistic (BBS) memperkirakan ada 5.513 anak berusia 5-17 tahun bekerja di sektor ini di 12.207 perusahaan di seluruh Bangladesh. Jumlah keseluruhan buruh anak adalah 24,5 persen dari total angkatan kerja di sektor ini. Anak-anak yang bersangkutan harus bekerja rata-rata lebih dari delapan jam perhari selama enam atau tujuh hari per minggu, dalam kondisi eksploitatif dengan gaji yang sangat terbatas. Sekitar 15 persen dari buruh anak dipaksa untuk bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang yaitu selama 11 jam atau lebih per hari. Sebanyak 48,2 persen dari anak-anak tersebut yang dapat membaca dan 47,9 persen dapat menulis. Hanya 7,9 persen dari mereka yang bersekolah. Berdasarkan laporan, hanya 13,2 persen anak-anak yang diberikan alat pelindung saat bekerja sehingga anak-anak sangat berpotensi terserang penyakit atau mengalami cedera akibat pekerjaan. Kepatuhan dan gaji yang rendah adalah motif yang paling umum diutarakan oleh pemilik perusahaan sebagai alasan mempekerjakan anak-anak. Hasil dari survey ini mengonfirmasikan bahwa anakanak yang bekerja di perusahaan pengisian/daur ulang baterai adalah korban eksploitasi.

Survei mengenai pekerja anak di sektor transportasi jalan (bus, mini-bus, tempo, taksi, becak, van, gerobak dorong, truk) megestimasiakan bahwa sebesar 85.600 anak, sebagian besar laki-laki, terlibat dalam aktivitas transportasi jalan di hampir 10.000 lokasi/situs di seluruh Bangladesh. Setengah dari jumlah tersebut bekerja sebagi pembantu di bus atau mini-bus, sepertiganya bekerja sebagai pengemudi becak atau pendorong/penarik gerobak, seperlima menjadi konduker dan

sisanya adalah tukang bersih-bersih atau melakukan tugas-tugas lain sesuai instruksi pengemudi. Bentuk pekerjaan ini juga membutuhkan waktu yang intensif, hampir setengah dari anak-anak tersebut bekerja tujuh hari per minggu, dan rata-rata anak-anak bekerja hampir sepuluh jam per hari. Jumlah yang sangat sedikit, yakni hanya dua persen dari mereka yang masih bersekolah. Hampir setengah dari anak-anak yang bersangkutan dilaporkan menderita masalah kesehatan, dan 12 persen dilaporkan mengalami penyiksaan oleh pemilik usaha. Penyiksaan ini tidak terkecuali yang dilakukan secara verbal. Seperempat dari anak-anak tersebut tidak tinggal bersama orang tua mereka, hal ini semakin meningkatkan kerentanan mereka terhadap penyiksaan di tempat kerja.

Survei pada tahun 2013 terhadap pekerja anak di perusahaan mobil menunjukkan jumlah pekerja anak berusia 5-17 tahun sebanyak 15.923 anak, dimana keseluruhannya adalah anak laki-laki. Jumlah ini merupakan 41,8 persen dari total tenaga kerja di sektor ini. Survei menemukan bahwa rata-rata anak-anak bekerja lebih dari sembilan jam per hari selama enam atau tujuh hari per minggu. Sebagian besar menghalangi kesempatan mereka untuk bersekolah, yakni mencapai 97 persen. Anak-anak ini melakukan tugas-tugas tertentu seperti perbaikan mekanis (78 persen), merekonstruksi atau memperbaiki badan kendaraan yang rusak (20 persen), dan mengecat kendaraan (10 persen). Sebagian besar anak-anak tersebut dikirim untuk bekerja di bengkel mobil oleh orang tua mereka (17 persen) atau dengan kerabat lainnya (24 persen). Tingkat penyakit dan cedera pada anak-anak di lingkungan kerja sangat tinggi, yaitu sebesar 32 persen, juga tidak tersedia alat pelindung untuk anak-anak tersebut. Sekitar 28 persen buruh anak dilaporkan dianiaya oleh majikan mereka, dimana satu dari sepuluh anak mengalami siksaan fisik.

Survei tahun 2013 terhadap anak jalanan menyebutkan jumlah total anak-

anak yang hidup (tidur, makan, dan bekerja) di jalan adalah sekitar 2.600 anak di seluruh Bangladesh. Studi menemukan bahwa anak jalanan terlibat dalam berbagai kegiatan dalam rangka untuk menambah eksistensi di jalanan, misalnya mengumpulkan kertas bekas, mengemis, menjajakan barang, semir sepatu, dan menjual bunga. Informan juga menunjukkan keterlibatan anak-anak dalam berbagai kegiatan terlarang termasuk pencurian, penjambretan, pencopet, penjualan narkoba, dan eksploitasi seksual. Berdasarkan survei, buruh anak sendiri mengakui bahwa mereka kesulitan mencari tempat tinggal. Lebih dari setengah melaporkan merasa sakit pada saat survei, seperempat dilaporkan tidak memiliki tempat tetap untuk tidur, 84 persen dilaporkan tidak memiliki pakaian

Upaya International Labour Organization (ILO) Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak

A. Program ILO Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak

Pemerintah ILO memiliki berbagai macam program yang secara umum bertujuan untuk menghapuskan perburuhan anak. Pada tataran anak-anak yang bekerja, ILO melancarkan strateginya ke dalam beberapa program seperti *Understanding Children's Work* (UCW), *Eradication of Hazardous Child Labour in Bangladesh* (EHCLB), *Reaching Out of School Children Project* (ROSC), *Urban Informal Economy project* (UIE), dan *Technical and Vocational Education and Training* (TVET) ILO membantu pemerintah dengan berupaya mencegah anak-anak terjerumus kedalam perburuhan anak dan menarik anakanak dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dan pekerjaan berbahaya. Anak-anak yang telah ditarik dari tempat mereka bekerja kemudian direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan, baik

pendidikan formal maupun non formal. Selain itu anak-anak tersebut diberi pelatihan untuk mengembangkan keterampilan mereka.

1. *Understanding Children's Work Project* (UCW)

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perburuhan anak, penyebab dan efek dari pekerja anak, bagaimana pekerja anak dapat diukur, dan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi perburuhan anak.

2. *Eradication of Hazardous Child Labour in Bangladesh*

Tujuan dari proyek ini adalah untuk menarik anak-anak dari pekerjaan berbahaya dengan memberikan pendidikan non-formal selama dua tahun termasuk pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, dan informasi untuk meningkat kesadaran tentang hak-hak anak dan pekerjaan berbahaya.

3. *Reaching Out of School Children Project*.

Proyek ini bertujuan untuk menciptakan peluang pendidikan dasar bagi anak-anak yang tidak bersekolah dan anak-anak yang putus sekolah. Program ini berjalan atas kerjasama ILO dengan World Bank sebagai organ yang memberikan donor.

4. *Urban Informal Economy Project*

Tujuan proyek ini adalah untuk menguatkan pengetahuan dasar dan mempersiapkan model yang mengatur, memantau, dan menghapuskan pekerjaan berbahaya di sektor ekonomi informal di wilayah perkotaan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemantauan pekerja anak yang multidisiplin, memberikan alternatif yang layak bagi anak-anak dan orang tua, wali, keluarga dan majikan mereka dalam bentuk pendidikan non-formal, pelatihan

pengembangan keterampilan, pemberdayaan sosial dan ekonomi, program perbaikan tempat kerja, dan kebutuhan dasar program layanan tambahan lainnya.

5. *Technical and Vocational Education and Training*

Proyek ini bertujuan untuk membantu Bangladesh dalam mengurangi kemiskinan melalui pendidikan teknis dan kejuruan dalam pelatihan sistem kebijakan.

B. Sosialisasi dan Advokasi

Sosialisasi dan advokasi yang dilakukan oleh ILO bertujuan untuk meningkatkan *awareness* seluruh elemen yang terlibat dalam perburuhan anak, yaitu pekerja anak, orang tua, pemilik usaha, masyarakat, dan pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan berupa kampanye dan publikasi program atau hasil penelitian dan survei. Secara umum, advokasi dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara seperti penyebaran informasi tentang apa itu pekerja anak, dampak sosial dan dampak fisik untuk anak, atau penyebaran informasi tentang hak-hak anak. Kampanye ini bisa dilakukan dengan berbagai aksi seperti melalui media cetak dan elektronik, penyebaran pamflet, teatrikal jalanan, pementasan drama dan beberapa alternatif lainnya.

Selain itu, ILO juga mengangkat isu pekerja anak di Bangladesh dalam forum-forum internasional sehingga menimbulkan *international awareness* terhadap isu ini. Dunia internasional mengancam tidak akan menggunakan produk ekspor yang pembuatannya dikerjakan oleh pekerja anak. Meski strategi ini tidak hanya digunakan di Bangladesh saja, tapi strategi ini dianggap berhasil. Keberhasilan langkah ini bisa dilihat seperti yang pernah terjadi pada tahun 1994-1995. Studi kasus menunjukkan pada tahun 1994, Amerika Serikat dan beberapa negara konsumen produk garmen hasil produksi Bangladesh mengancam akan memboikot ekspor

perusahaan garmen yang mempekerjakan pekerja anak. Tindak lanjut dari kejadian ini adalah pemerintah Bangladesh beserta *Bangladesh Garment Manufacturers and Export Association* (BGMEA) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan ILO dan UNICEF untuk menghapuskan pekerja anak dan mencegah anak-anak masuk dan bekerja di industri garmen. Program ini berhasil menarik 8000 anak di bawah usia 14 tahun dari 800 perusahaan dan mendaftarkan mereka ke dalam program pendidikan khusus. Program ini terus berjalan hingga saat ini dan menaikkan pamor Bangladesh di arena internasional. Dari kasus ini bisa dilihat, bahwa adanya kecemasan masyarakat internasional terhadap perburuhan anak tentunya akan mendorong pemerintah Bangladesh untuk segera menghapuskan praktik perburuhan anak di sektor lain di negaranya.

ILO sebagai organisasi internasional menjalankan peran dan fungsinya di Bangladesh dengan meningkatkan pemahaman mengenai pekerja anak, penyebab, dan efek dari pekerja anak, bagaimana pekerja anak dapat di ukur, dan untuk mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengatasi perburuhan anak di Bangladesh. Bangladesh sebagai Negara anggota ILO meratifikasi konvensi yang dikeluarkan oleh ILO dan kemudian merumuskan kebijakan domestik sebagai follow up dari ratifikasi tersebut.

Berdasarkan penelitian diatas dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peranan ILO di Bangladesh sangat besar pada tataran kebijakan. Atas bantuan dan dorongan ILO, Bangladesh telah merumuskan beberapa UU terkait pekerja anak dan bahkan pemerintah Bangladesh membentuk unit khusus penanganan pekerja anak yaitu Child Labour Unit. Meskipun Bangladesh belum meratifikasi konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum, tetapi peraturan legislasi merujuk pada Konvensi tersebut, misalnya

usia minimum pekerja anak dalam *Labour Act* adalah 14 tahun, sesuai dengan yang disebutkan dalam Konvensi No.138.

Masuknya suatu negara menjadi anggota organisasi internasional sudah pasti dilatarbelakangi oleh adanya tujuan yang ingin dicapai negara melalui organisasi internasional tersebut. Bangladesh yang notabene adalah negara berkembang belum mampu mengatasi sendiri masalah domestik negaranya. Pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pendidikan, penegakan hukum juga masih terbilang lemah. Kehadiran ILO mendampingi pemerintah dalam menyelesaikan masalah pekerja anak mulai dari tataran teknis hingga tataran kebijakan adalah suatu bentuk advokasi yang sangat diperlukan oleh Bangladesh.

TANTANGAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA ANAK DI BANGLADESH

Tantangan ILO dalam menghapuskan pekerja anak di Bangladesh pada dasarnya terletak pada faktor-faktor yang menyebabkan pekerja anak itu muncul dan menjadi hal yang umum ditemukan di Bangladesh. Berdasarkan konteks pekerja anak, faktor utama penyebab keberadaan pekerja anak adalah faktor kemiskinan, tradisional, produksi, pendidikan, dan legislasi. Kelima hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga menjadikan perburuhan anak adalah persoalan yang kompleks. Tantangan ILO dalam mengeliminasi perburuhan anak bisa dikelompokkan menjadi empat, yaitu kemiskinan masyarakat Bangladesh, kultur di Bangladesh yang menganggap pekerja anak adalah hal yang wajar, sistem pendidikan yang tidak memadai, dan lemahnya penegakan hukum yang menyangkut pekerja anak.

Kemiskinan

Tantangan utama ILO dalam mengeliminasi perburuhan anak di Bangladesh adalah kultur ekonomi yang melekat dalam masyarakat Bangladesh. Negara ini dikenal sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tinggi. Meskipun dikatakan Bangladesh mengalami penurunan angka kemiskinan sejak tahun 2000, namun faktanya penduduk miskin di Bangladesh masih berjumlah 47 juta jiwa. Lagipula, kondisi ini masih dikatakan rawan atau belum stabil, penduduk masih akan terancam jatuh miskin akibat bencana alam yang sering terjadi di Negara ini.

Bangladesh juga terkenal sebagai negara dengan urbanisasi yang tinggi. Luas negara sebesar 147.570 km² dan populasi penduduk sebanyak 150, 2 juta jiwa menjadikan kepadatan penduduk Bangladesh adalah 1.015 jiwa/km². Dengan kondisi seperti ini sebagian masyarakat pedesaan tidak memiliki lahan pertanian untuk diolah sehingga mendorong mereka untuk bermigrasi ke kota. Kemajuan ekonomi yang lebih banyak terjadi di kota, membuat desa-desa menjadi tertinggal sehingga penduduk lebih tertarik untuk mencari pekerjaan di kota. Hal ini berlanjut pada masalah padatnya penduduk yang berada di perkotaan berarti tingkat persaingan untuk mendapat pekerjaan sangat tinggi. Mereka yang miskin dan kurang berpendidikan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di sisi lain, seorang pemilik usaha tentu ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih patuh dan digaji lebih murah daripada pekerja dewasa. Terlebih lagi, usaha milik perseorangan seperti ini yang dikategorikan dalam sektor ekonomi informal adalah ladangnya pekerja anak, seperti pabrik las, bengkel mobil, pabrik daur ulang baterai, bekerja di transportasi umum, dan pembantu rumah

tangga. Kondisi seperti ini yang terjadi secara terus menerus menjadi kendala ILO dalam menghapuskan perburuhan anak di Bangladesh.

Contoh kasus yang terjadi di Bangladesh, Mohammad Hossain, bekerja sebagai pedagang sayur keliling, tinggal di perkampungan kumuh bersama orang tuanya yang bermigrasi dari desanya di daerah Mymensingh. Ayahnya juga seorang penjual sayur keliling dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Usia Hossain saat ini adalah 12 tahun dan telah melakukan pekerjaan ini selama lima tahun. Artinya, ia mulai bekerja sejak usia tujuh tahun. Ayahnya tidak lagi mampu bekerja karena faktor usia sehingga hal ini memaksa Hossain untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya dan berhenti bersekolah saat ia tengah duduk di bangku kelas empat. Hossain bekerja sejak pukul delapan pagi hingga pukul dua belas siang, dengan penghasilan rata-rata harian adalah BDT 70 (USD 0,90), seluruh penghasilannya dia berikan untuk keluarganya.

Kultur

Salah satu tantangan ILO dalam mengatasi masalah pekerja anak di Bangladesh adalah masalah kultur. Beberapa faktor budaya yang memberi kontribusi terhadap tantangan ILO dalam mengatasi masalah pekerja anak di Bangladesh, yaitu:

a. Peran Anak Dalam Keluarga.

Kepatuhan terhadap orangtua dan kewajiban untuk membantu keluarga menyebabkan anak-anak di Bangladesh rentan menjadi pekerja anak. Pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan pekerja anak yang disebabkan oleh lilitan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keluarga.

Pekerja anak Bangladesh, tidak jarang ditemukan bekerja bersama kedua orangtuanya, bahkan sebagian orangtua

berani mempekerjakan anaknya di bidang konstruksi dan pabrik daur ulang yang berbahaya. Anak-anak tersebut dibayar dengan upah yang sangat rendah (tabel 3.1), padahal kebanyakan dari mereka telah bekerja lebih dari 12 jam per hari. Banyak anak di Bangladesh yang memilih menjadi kuli pabrik dibanding berangkat ke sekolah.

b. Sejarah Pekerjaan Karena Jeratan Hutang.

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dianggap merupakan hal yang lumrah di Bangladesh. Anak yang ditempatkan sebagai pekerja karna jeratan hutang, khususnya, rentan terhadap kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

c. Peran Perempuan Dalam Keluarga.

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap bagi kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban inilah yang membuat wanita maupun anak perempuan di Bangladesh bekerja untuk membantu keluarga mereka.

d. Pernikahan Dini

Pernikahan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan juga seringkali, perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap eksploitasi yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka. Pada tahun

2015, Bangladesh menjadi negara ke-8 dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia. Sebanyak 29 persen diantara gadis Bangladesh menikah sebelum usia 15 tahun dan 65 persen menikah sebelum usia 18 tahun.

Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap pekerja anak. Kedua hal ini menunjukkan relativitas yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat perburuhan anak yang tinggi juga menunjukkan jumlah anak-anak tidak bersekolah yang tinggi. Kemiskinan jelas menjadi penghambat yang penting bagi anak-anak untuk mengakses sekolah, hadir secara teratur, dan menyelesaikan sekolah. Hal ini dikarenakan lebih dari 40% biaya sekolah dibebankan kepada orang tua, seperti buku, seragam, dan transportasi.

Kemiskinan menjadikan pendidikan adalah barang mewah. Jika memenuhi kebutuhan primer saja sangat sulit, apalagi untuk memenuhi biaya pendidikan. Walaupun biaya pendidikan dasar digratiskan oleh pemerintah, namun, biaya kebutuhan lainnya seperti seragam sekolah, buku pelajaran, alat tulis, dan transportasi masih memberatkan mereka yang berasal dari keluarga miskin. Paradigma orang tua mengenai pendidikan pun menjadi tantangan tersendiri. Orang tua menganggap bahwa pendidikan tidak memberikan keuntungan materiil terhadap perekonomian keluarga, justru menjadi beban ekonomi.

Anak-anak yang putus sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar, cenderung tidak akan melanjutkan pendidikannya bahkan jika ada kesempatan. Hal ini dikarenakan mereka merasa lebih nyaman bekerja dan mendapatkan upah walaupun mereka tidak menyadari bahaya kerja dan minimnya upah yang diberikan kepada mereka. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Bangladesh untuk

mengembalikan minat pekerja anak untuk bersekolah.

Sistem pendidikan Bangladesh yang tidak memadai pada dasarnya memiliki pengaruh yang besar terhadap perburuhan anak. Berdasarkan tulisan Abu Afsarul Heider dalam *The Daily Star*, sebanyak 70% anak tidak bisa membaca atau mengerjakan soal matematika dasar dengan baik bahkan setelah lima tahun bersekolah di sekolah dasar. Perbandingan ideal guru dan siswa yang berlaku secara internasional adalah 1:30, tetapi di Bangladesh yang terjadi adalah seorang guru menghadapi 53 orang siswa. Selain itu, sebanyak 6300 sekolah dasar tidak memiliki kepala sekolah.

Kurikulum yang diajarkan disekolah tidak menunjang minat dan bakat siswa juga tidak menunjang permintaan akan keterampilan kerja yang dibutuhkan saat melamar pekerjaan. Padahal, Bangladesh memiliki visi untuk berada di urutan pertama dari deretan middle income country di tahun 2021. Untuk mencapai visi tersebut maka misi Bangladesh adalah memajukan industri negaranya. Otomatis, dibutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan sebagai penggerak industri.

Tingkat pendidikan orang tua sebenarnya juga memiliki pengaruh dalam keterlibatan menjadi pekerja anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah seringkali tidak mengerti apa itu pekerja anak dan apa pengaruhnya terhadap anak-anak mereka, dimana para orang tua, dalam beberapa kasus, lebih sering mendorong anaknya untuk bekerja daripada bersekolah. Sebuah penelitian yang dilaksanakan UNICEF di Amerika Latin, Karibia, Asia Selatan, dan Sub-Sahara Afrika menemukan bahwa rata-rata anak-anak yang ibunya berpendidikan rendah (baca-tulis), beresiko dua kali lipat lebih besar untuk menjadi pekerja anak dibandingkan anak-anak yang ibunya pernah bersekolah sampai ke tingkat sekolah dasar. Bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi sebuah siklus. Pendidikan orang tua yang rendah,

membuat para orang tua buta pengetahuan akan pekerja anak, kemudian mendorong atau memaksa anak mereka untuk bekerja. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan membuat mereka terpaksa meninggalkan sekolah atau harus menyeimbangkan bersekolah dan bekerja. Akibat kurangnya pendidikan dan pengetahuan, maka anak-anak ini di masa yang akan datang akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada akhirnya, mereka akan kembali mendorong anak-anak mereka untuk bekerja. Siklus ini harus diputuskan untuk menghapuskan perburuhan anak.

Pendidikan dinilai sangat perlu untuk mendapat perhatian khusus pemerintah, meskipun terjadi penurunan terhadap jumlah pekerja anak, namun ternyata penurunan ini tidak diikuti oleh peningkatan anak-anak memasuki sekolah. Pada tahun 2013 anak yang bekerja mengalami penurunan sebesar empat persen sementara anak yang bersekolah statis di angka 78 persen. Peningkatan justru terlihat pada kelompok anak yang tidak bersekolah dan tidak bekerja. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah sangat perlu untuk melakukan inovasi dalam sistem pendidikan untuk mengembalikan minat bersekolah anak-anak, karena sangat disadari dan telah dipahami bahwa pendidikan dan pekerja anak memiliki sinergitas. Semakin tinggi jumlah anak yang bersekolah akan mengurangi jumlah anak-anak yang bekerja.

Penegakan Hukum

Keterlibatan anak-anak dalam buruh anak dimuat dalam undang-undang ketenagakerjaan (*Labour Act*) yang berlaku pada tahun 2006. UU ini adalah kerangka hukum utama mengenai pekerja anak di Bangladesh. Undang-undang menetapkan usia minimum untuk bekerja dalam pekerjaan atau usaha apapun adalah 14 tahun. Namun dinyatakan juga bahwa anak yang telah melewati usia 12 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan, yakni

pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan dan pertumbuhan atau mengganggu pendidikan. Bagian 39, 40, dan 42 dari UU baru ini menunjukkan beberapa kegiatan yang sangat melarang mempekerjakan anak-anak usia 14-17 tahun, namun UU tidak mengandung daftar komprehensif tentang bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya.

Kurangnya ketentuan yang jelas tentang pekerjaan ringan dan daftar bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya yang berlaku secara nasional berarti tidak memungkinkan untuk membangun ukuran statistik secara umum berdasarkan perundang-undangan. Sehingga Bangladesh berpatokan pada ukuran yang digunakan secara global oleh ILO. Berdasarkan standar global yang digunakan ILO, maka anak-anak usia 5-11 tahun mengerjakan pekerjaan ringan, usia 12-14 tahun terlibat pekerjaan harian atau bentuk terburuk, dan 15-17 tahun dalam bentuk pekerjaan terburuk.

Anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti yang diatur dalam konvensi ILO No. 182 adalah kelompok buruh anak yang hak-haknya dikompromikan dan yang kesejahteraannya paling terancam. Oleh karena itu, mereka menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Perundang-undangan Bangladesh tidak memuat daftar yang spesifik tentang bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya bagi buruh anak, namun mengikut pada bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya yang digunakan ILO.

Lemahnya aturan juga diperlihatkan dalam undang-undang perburuhan, *Labour Act* 2006. *Labour Act* ini memiliki kesenjangan dalam hal perlindungan legal terhadap pekerja anak. UU ini hanya terfokus pada pekerjaan di sektor formal atau semi-formal dan mengabaikan pekerja anak yang bekerja di ekonomi pedesaan. Tidak ada referensi yang dibuat oleh legislatif yang membahas mengenai sektor agrikultur, bisnis informal berskala kecil, atau pekerjaan berbasis keluarga, dimana secara kolektif menyumbang angka 80

persen pelibatan pekerja anak. Dalam UU ini juga disebutkan hukuman hingga satu tahun penjara akan dijatuhkan kepada orang tua atau wali yang membuat persetujuan kerja atas nama anak mereka. Sanksi ini sangat lemah dan tidak memberi efek jera mengingat orang tua berperan sangat penting dalam keterlibatan anak menjadi pekerja.

Bangladesh telah menunjukkan *political commitment* untuk menghapuskan perburuhan anak melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berkaitan dengan pekerja anak, seperti *Labour Act 2006*, *National Child Labour Elimination Policy 2010*, *National Education Policy 2010*, dan *National Education Policy 2010*. Namun tetap saja sebagai suatu organisasi internasional, ILO tentunya melakukan penetapan standar dalam bentuk konvensi atau rekomendasi. Meskipun telah meratifikasi tujuh dari delapan konvensi dasar ILO, tetapi Bangladesh belum meratifikasi konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang usia minimum pekerja yang notabene adalah standar internasional terpenting terkait masalah pekerja anak. Tentu saja ini merupakan salah satu tantangan bagi ILO karena konvensi adalah instrumen ILO untuk menetapkan standar tertentu dimana standar tersebut kemudian akan diterapkan melalui kebijakan nasional negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Konvensi yang berasal dari organisasi internasional sebagaimana sifat dari suatu perjanjian internasional yang dikemukakan Sri Setianingsih, mempunyai kekuatan mengikat bagi pesertanya. Berarti bisa dikatakan ILO tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap Bangladesh terkait standar usia pekerja. Padahal, konvensi ini adalah salah satu dari delapan konvensi dasar ILO dan merupakan satu-satunya konvensi dasar yang belum diratifikasi oleh Bangladesh.

Bangladesh memang belum meratifikasi Konvensi ILO tentang Usia Minimum, tetapi peraturan nasional Bangladesh

menyangkut pekerja anak mengatakan bahwa usia minimum anak-anak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan ringan adalah 14 tahun. Tetapi faktanya, banyak anak-anak berusia dibawah 14 tahun yang bekerja bahkan di sektor berbahaya. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Bangladesh masih lemah. Padahal, Bangladesh telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Pekerja Anak dan unit khusus yang menangani pekerja anak, *Child Labour Unit*. Namun penanganan pekerja anak terkesan masih sangat lambat. ILO berupaya mendesak CLU untuk merancang *Child Labour Monitoring System (CLM)* untuk menyatukan dan menganalisis situasi terbaru pekerja anak dan mengawasi aktivitas yang relevan terhadap penghapusan pekerja anak yang dilakukan oleh aktor-aktor selain pemerintah. Lambatnya penanganan adalah akibat dari seringkali terjadi *overlapping* serta saling lempar tanggung jawab antara dua kementerian yaitu *Ministry of Women and Children Affair* dan *Ministry of Labour and Employment*.

Adanya saling lempar tanggung jawab atau dualisme dalam penanganan pekerja anak merupakan tantangan bagi ILO selaku organisasi eksternal yang hendak membantu permasalahan dalam negeri. Adanya dualisme ini menyebabkan koordinasi antarbadan yang bertanggungjawab dalam penanganan pekerja anak menjadi lambat dan tidak taktis. Pada dasarnya tantangan terbesar ILO dalam mereduksi pekerja anak di Bangladesh akibat regulasi yang belum jelas di tataran eksekutif. Hal inilah yang menjadi batu sandungan bagi keberadaan ILO di Bangladesh untuk mereduksi perburuhan anak.

Simpulan

Di Bangladesh pekerja anak merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan. Hal ini menjadi suatu faktor

dalam mempekerjakan anak-anak bahkan dengan pekerjaan yang eksploitatif, upah yang murah, dan pekerjaan yang berbahaya. Keadaan pekerja anak adalah hal yang dilematis, di satu sisi anak-anak bekerja untuk memberikan kontribusi pendapatan keluarga namun mereka rentan dengan eksploitasi dan perlakuan yang salah. Faktor lain yang menyebabkan adanya pekerja anak yaitu adanya alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Dengan demikian para pengusaha memilih anak sebagai pekerjanya karena upah yang diberikan akan cenderung lebih murah daripada orang dewasa. Disamping itu anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.

Salah satu hal utama dalam fenomena pekerja anak yaitu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan Organisasi Internasional yang berwenang untuk menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu semakin meningkatnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu organisasi yang berperan dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terutama dalam menangani kasus pekerja anak atau buruh di dunia, organisasi tersebut yaitu *International Labour Organization (ILO)*.

Sebagai Organisasi Internasional yang menanggulangi masalah perburuhan, ILO sering menangani masalah pelanggaran hak anak, salah satunya yaitu pekerja anak. Pelanggaran yang terjadi pada anak mengakibatkan lebih cepatnya anak-anak terjun kedalam dunia kerja. Dimana kondisi ini menimbulkan masalah

baru diantaranya eksploitasi terhadap anak. Bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak baik formal maupun informal menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-haknya dibidang pendidikan, pelayanan, kesehatan, belajar dan bermain seperti halnya eksploitasi seks, eksploitasi tenaga, maupun eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam berupaya mengatasi masalah pekerja anak di Bangladesh ILO mempunyai tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Adapun tantangan ILO dalam mengatasi masalah pekerja anak di Bangladesh yaitu (1) perburuhan anak dianggap sebagai sesuatu yang kultural di Bangladesh. Anak dari keluarga miskin yang bekerja dilihat sebagai sesuatu yang wajar, dan kebanyakan orang tua tidak melihat apa yang salah dari mengizinkan anak mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga; (2) Pekerja anak dianggap merupakan hal yang wajar bagi masyarakat Bangladesh. Kepatuhan terhadap orangtua dan kewajiban untuk membantu keluarga maupun praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan hal yang wajar di Bangladesh; (3) Sistem pendidikan Bangladesh yang tidak memadai pada dasarnya memiliki pengaruh yang besar terhadap perburuhan anak. Mahalnya biaya pendidikan mengakibatkan anak-anak terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah.; (4) Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pekerja anak ternyata tidak berjalan dengan efektif. Pekerja anak yang bekerja di sektor informal tidak dilindungi oleh undang-undang, hal ini menyebabkan, praktik perburuhan anak di sektor informal belum mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.

A Baseline Survey of Street Children in Bangladesh, Foundation For Research on Educational Planning and

Daftar Pustaka:

Buku:

- Development. Dhaka, 2013.
- Bangladesh Bureau of Statistics, *Child Labour Survey Bangladesh 2013*. 2015.
- Ennew, Judith & Dominique P. Plateau. *Cara Berkomunikasi: Menggalang Tindakan Menentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak*, terj. Cyberconsult, UNICEF. Jakarta, 2002.
- International Labour Organization. *Child Labour and Education in Bangladesh: Evidence and Policy Recommendation*, International Labour Organization. Dhaka, 2012.
- Konvensi Hak-hak Anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* edisi revisi, LP3ES. Jakarta, 1990.
- Suherman, Ade Maman. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, Macmilan Publishing Company. New York, 1990.
- Jurnal:**
 Aktar, Sharmin & Abu Syead Muhammed Abdullah. “Protecting Child Labour in Bangladesh: Domestic Laws versus International Instruments”, *Bangladesh e-Journal of Sociology*, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Basu, Kaushik and Pham Hong Van. 1998. *The economics of Child Labour*, *American Economic Review*. 88.3 pp.412-27
- Elliot, Kimberly Ann and Richard, B. Freeman. 2003. *Can labor standards improve under globalization?* Washington, DC: Institute for International Economics, pp. 112-115.
- Rahman, K. M. Mustafizur; Islam, Towfiqua Mahfuza, and Tareque, Md. Ismail, 2010. “Socioeconomic correlates of child labour in agricultural sector of rural Rajshahi District, Bangladesh.” *International Journal of Sociology and Anthropology*, 2(6):109-117
- Soetarso. “Buruh Anak. Eksploitasi atau Kebutuhan”, *Altruist*, Vol. 3, No. 9.

Website :

- About The ILO*, melalui website <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang-en/index.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2016
- Abu Afsarul Haider, “Problems With Our Education Sector”, *The Daily Star*, May 14,

- 2014, dalam <http://www.thedailystar.net/op-ed/problems-with-our-education-sector-23954> diakses tanggal 15 Agustus 2016
- Bangladesh. <http://id.globalvoiceonline.org/2012/08/07/bangladesh-dhaka-menjadi-ibukota-budaya-muslim/> diakses pada tanggal 18 Juli 2016
- Bangladesh – Child Marriage Around the World*, <http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/Bangladesh/> diakses pada tanggal 27 September 2016
- Bangladesh Overview, <http://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview>, diakses pada tanggal 20 Juli 2016
- Children Of Poverty: The Factory Workers As Young As FIVE Who Toil In Bangladesh Recycling Plant Every Day*. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2616932/Children-poverty-Factory-workers-agd-FIVE-toil-Bangladesh.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016
- Employers' and Workers' Response to Child Labour*, <http://www.oit.org/public/english/standards/ipec/about/factsheet/expls98/indexpr.htm>, diakses pada 17 Mei 2014.
- ILO. *About The ILO*. <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang-en/index.htm>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016
- <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang-en/index.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2016
- ILO. *What Is Child Labour*. <http://ilo.org/ipec/fscts/lang-en/index.htm>, diakses pada tanggal 11 Maret 2016
- Mohammad Zulfiquer Hossain. *Child Labour: trends and features*. <http://www.banglarights.net/HTML/ChildLabour.htm>, diakses pada tanggal 11 Maret 2016
- OHCHR. *Convention of The Right of The Child*, <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016
- The International Labour Office, <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-office/lang-en/index.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2016
- What is child labour* dalam <http://www.ilo.org/ipec/facts/lang-en/index.htm> diakses pada 19 Maret 2016